

DAMPAK BREXIT TERHADAP STABILITAS POLITIK UNI EROPA MELALUI PERSPEKTIF TEORI INTEGRASI REGIONAL

Avinda Ghaniya*, Chantiqa Azzahra Nabila Tambunan

Universitas Sriwijaya

Email*: avindaghaniya28@gmail.com

Abstract. Brexit is one of the most significant political events in the history of the European Union, having a major impact on political stability and regional integration. This study analyzes how Brexit affects the political dynamics of the European Union, especially in terms of foreign policy, security and institutional stability. Using a regional integration theory perspective, this research identifies the challenges that emerged after the UK left the European Union, including increasing euroscepticism, changes in the EU's institutional structure, as well as power imbalances between member states. The research results show that Brexit not only shook the European Union's political order but also prompted changes in regional integration policies and strategies. The European Union faces challenges in maintaining its internal cohesion, but on the other hand it is also trying to strengthen cooperation mechanisms to ensure the sustainability of the integration project. This study highlights the importance of policy reform and strategy adaptation to maintain political stability and strengthen member countries' commitment to facing global challenges.

Keywords: Brexit, European Union, regional integration, political stability, euroscepticism.

Abstrak. Brexit adalah salah satu peristiwa politik paling signifikan dalam sejarah Uni Eropa, yang mempunyai dampak besar terhadap stabilitas politik dan integrasi regional. Studi ini menganalisis bagaimana Brexit mempengaruhi dinamika politik Uni Eropa, khususnya dalam hal kebijakan luar negeri, keamanan dan stabilitas institusi. Dengan menggunakan perspektif teori integrasi regional, penelitian ini mengidentifikasi tantangan-tantangan yang muncul setelah Inggris keluar dari Uni Eropa, antara lain meningkatnya skeptisisme terhadap euro, perubahan struktur kelembagaan UE, serta ketimpangan kekuasaan antar negara anggota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Brexit tidak hanya mengguncang tatanan politik Uni Eropa tetapi juga mendorong perubahan kebijakan dan strategi integrasi regional. Uni Eropa menghadapi tantangan dalam menjaga kohesi internalnya, namun di sisi lain juga berupaya memperkuat mekanisme kerja sama untuk menjamin keberlanjutan proyek integrasi. Studi ini menyoroti pentingnya reformasi kebijakan dan adaptasi strategi untuk menjaga stabilitas politik dan memperkuat komitmen negara-negara anggota dalam menghadapi tantangan global.

Kata kunci: Brexit, Uni Eropa, integrasi regional, stabilitas politik, Euroskeptisisme.

Copyright©2025. Avinda Ghaniya

This is an open access article under the CC-BY NC-SA license

DOI: <https://doi.org/10.1234/ssrj.v2i1.29>

PENDAHULUAN

Inggris bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 1973 dengan harapan memperkuat kerja sama ekonomi dan politik di kawasan Eropa. Selama beberapa dekade, hubungan antara Inggris dan Uni Eropa berjalan cukup baik meskipun terkadang diwarnai perbedaan pandangan, terutama dalam hal kebijakan ekonomi dan integrasi politik. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul berbagai isu yang memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan elit politik Inggris terhadap keanggotaan mereka di Uni Eropa. Isu-isu seperti kedaulatan nasional, kebijakan imigrasi yang dianggap terlalu longgar, serta kontribusi ekonomi Inggris yang besar terhadap anggaran Uni Eropa menjadi faktor utama yang memicu gelombang euroscepticism.

Correspondence Avinda Ghaniya  Email: avindaghaniya28@gmail.com

Dampak Brexit terhadap Stabilitas Politik Uni Eropa melalui Perspektif Teori Integrasi Regional

Ketidakpuasan ini memuncak pada referendum 23 Juni 2016, di mana mayoritas rakyat Inggris memilih untuk keluar dari Uni Eropa, sebuah keputusan yang dikenal sebagai Brexit.

Keputusan Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa bukan sekadar masalah nasional, tetapi juga menjadi pukulan besar bagi stabilitas politik dan ekonomi kawasan. Uni Eropa sebagai organisasi supranasional dibangun berdasarkan prinsip integrasi, di mana negara-negara anggotanya menyerahkan sebagian kedaulatan mereka demi kepentingan kolektif. Namun, Brexit menunjukkan bahwa integrasi regional tidak selalu berjalan mulus dan bahkan dapat mengalami kemunduran ketika ketidakpuasan terhadap kebijakan supranasional meningkat. Kepergian Inggris memicu kekhawatiran akan munculnya gelombang euroscepticism di negara-negara lain seperti Italia, Hungaria, dan Polandia, yang juga mulai mempertanyakan manfaat keanggotaan mereka di Uni Eropa. Selain itu, Uni Eropa menghadapi tantangan dalam menyesuaikan kebijakan dan struktur kelembagaannya tanpa kehadiran Inggris, terutama dalam bidang perdagangan, keamanan, dan regulasi ekonomi. Negara-negara besar seperti Jerman dan Prancis pun harus memainkan peran lebih dominan dalam pengambilan keputusan untuk menjaga stabilitas organisasi.

Melalui penelitian ini, akan dianalisis bagaimana Brexit mempengaruhi stabilitas politik Uni Eropa dari berbagai aspek, termasuk dinamika internal organisasi, respons kebijakan Uni Eropa, serta potensi jangka panjang bagi kesatuan politik regional. Dengan menggunakan perspektif teori integrasi regional, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana Uni Eropa dapat bertahan dari tantangan yang timbul akibat Brexit dan bagaimana langkah-langkah strategis dapat diambil untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi di masa depan. Untuk itu, penelitian ini akan berfokus pada tiga tujuan utama, yakni menganalisis dampak Brexit terhadap stabilitas politik Uni Eropa, mengidentifikasi tantangan politik yang muncul pasca-Brexit, serta mengevaluasi respons kebijakan Uni Eropa dalam menjaga stabilitas regional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Seperti yang dijelaskan oleh Creswell (2014), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui data non-numerik, seperti dokumen, wawancara, atau teks tertulis. Dalam konteks ini, pendekatan deskriptif-analitis berarti penelitian akan menggambarkan secara komprehensif proses integrasi regional Uni Eropa serta tantangan yang muncul akibat Brexit, sekaligus menganalisis implikasi politik, ekonomi, dan sosial yang ditimbulkan. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih luas mengenai dinamika integrasi Uni Eropa serta bagaimana organisasi tersebut menghadapi gejolak politik yang mengancam stabilitasnya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen atau laporan yang telah tersedia. Menurut Bryman (2012), penggunaan data sekunder dalam penelitian kualitatif penting karena memungkinkan analisis berbasis bukti yang lebih kuat tanpa perlu mengumpulkan data primer. Dalam penelitian ini, sumber utama mencakup laporan resmi Uni Eropa, yang memberikan informasi langsung mengenai kebijakan dan regulasi sebelum dan sesudah Brexit. Selain itu, jurnal akademik menjadi referensi utama untuk memahami berbagai perspektif teoretis mengenai dampak Brexit terhadap Uni Eropa. Laporan dari lembaga internasional seperti OECD (Organisation for Economic Co-operation and

Development), IMF (International Monetary Fund), dan Bank Dunia juga digunakan karena menyediakan data dan analisis ekonomi global yang relevan, termasuk pertumbuhan ekonomi, perdagangan, serta stabilitas politik pasca-Brexit.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan teknik studi literatur dan analisis kebijakan politik Uni Eropa sebelum dan sesudah Brexit. Studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai sumber akademik dan dokumen resmi untuk memahami bagaimana teori neofungsionalisme, yang diperkenalkan oleh Ernst B. Haas (1958), menjelaskan integrasi regional melalui mekanisme spillover, di mana kerja sama dalam satu sektor cenderung meluas ke sektor lain.

Sementara itu, analisis kebijakan berfokus pada perubahan kebijakan politik Uni Eropa akibat keluarnya Inggris, termasuk dampaknya terhadap kebijakan perdagangan, keanggotaan, dan stabilitas institusional. Sebagaimana dikemukakan oleh Hill & Smith (2011), perubahan kebijakan dalam Uni Eropa sering kali bergantung pada dinamika internal dan kepentingan negara-negara anggotanya, sehingga analisis ini dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana Uni Eropa mempertahankan integrasinya meskipun menghadapi tantangan besar seperti Brexit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Stabilitas Politik Uni Eropa Pasca-Brexit

Keputusan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa melalui referendum pada 23 Juni 2016 menandai peristiwa penting dalam sejarah integrasi regional Eropa. Keputusan ini tidak hanya mempengaruhi hubungan bilateral antara Inggris dan Uni Eropa, tetapi juga memberikan dampak besar terhadap dinamika politik dan institusi supranasional Uni Eropa secara keseluruhan. Sejak Inggris resmi keluar dari Uni Eropa pada 31 Januari 2020, perubahan dalam keseimbangan kekuasaan di dalam organisasi mulai terlihat, terutama dalam hal kepemimpinan politik, kebijakan ekonomi, dan pengaruh negara-negara anggota dalam pengambilan keputusan di tingkat Uni Eropa. Dalam konteks ini, laporan Vote Watch Europe (2016) menggarisbawahi beberapa konsekuensi utama Brexit, termasuk meningkatnya beban regulasi bagi bisnis di Uni Eropa, perubahan arah kebijakan di bidang perdagangan dan perpajakan, serta berkurangnya dukungan terhadap industri nuklir dan energi alternatif (Luneto Riska, 2021).

Pengaruh Brexit terhadap Kesatuan Politik Uni Eropa

Salah satu dampak utama Brexit adalah perubahan dalam keseimbangan politik antar negara anggota Uni Eropa. Sebelum Brexit, Inggris merupakan salah satu kekuatan utama dalam Uni Eropa, sering kali berperan sebagai penyeimbang antara kepentingan negara-negara kontinental seperti Jerman dan Prancis serta kelompok negara Nordik yang lebih pro-pasar bebas. Laporan Vote Watch Europe mencatat bahwa mayoritas politisi Inggris di lembaga-lembaga Uni Eropa cenderung mendukung kebijakan pasar bebas dan menentang regulasi yang berlebihan terhadap bisnis. Dengan keluarnya Inggris, kelompok yang mendorong pengurangan regulasi dalam ekonomi Uni Eropa kehilangan salah satu pendukung terkuatnya, yang berpotensi meningkatkan beban regulasi bagi bisnis di kawasan tersebut (Farhan Anshari, n.d.).

Inggris juga memiliki peran penting dalam isu kebijakan fiskal dan perdagangan. Sebelum Brexit, Inggris sering kali menjadi penghambat upaya Uni Eropa untuk memperkuat harmonisasi pajak dan meningkatkan pajak transaksi keuangan. Dengan tidak adanya Inggris, ada kecenderungan meningkatnya dorongan bagi negara-negara

anggota untuk lebih mengharmonisasikan kebijakan pajak mereka, yang dapat menyebabkan peningkatan beban pajak bagi bisnis dan individu di beberapa negara anggota.

Di sisi lain, Inggris sering kali menjadi negara yang paling sering kalah dalam pemungutan suara di Dewan Uni Eropa. Menurut laporan Vote Watch Europe, Inggris berada di pihak yang kalah dalam pemungutan suara di Dewan Uni Eropa sebanyak 12,3% selama periode 2009-2015, lebih banyak dibandingkan negara anggota lainnya. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun Inggris memiliki peran penting dalam Uni Eropa, banyak kebijakan yang diadopsi oleh Uni Eropa sering kali bertentangan dengan kepentingan Inggris. Oleh karena itu, bagi beberapa kalangan di Inggris, keluar dari Uni Eropa dianggap sebagai langkah untuk mendapatkan kembali kendali atas kebijakan nasional tanpa harus tunduk pada keputusan mayoritas di Uni Eropa (Banks, 2016).

Dengan keluarnya Inggris, Uni Eropa kehilangan salah satu dari tiga ekonomi terbesar dan negara dengan pengaruh politik yang signifikan. Hal ini membuat Prancis dan Jerman semakin memperkuat dominasi mereka dalam Uni Eropa, terutama dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, kebijakan luar negeri, dan keamanan. Jerman, sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Uni Eropa, kini harus menanggung beban yang lebih besar dalam membiayai anggaran Uni Eropa. Sebelum Brexit, Inggris merupakan salah satu kontributor terbesar bagi anggaran Uni Eropa, sehingga keluarnya Inggris menyebabkan kesenjangan keuangan yang harus ditutupi oleh negara-negara anggota lainnya. Hal ini menimbulkan ketegangan di antara negara-negara anggota, terutama negara-negara yang lebih kecil dan kurang berkembang yang mengandalkan subsidi dari anggaran Uni Eropa (Banks, 2016).

Sementara itu, Prancis di bawah kepemimpinan Emmanuel Macron semakin mendorong integrasi lebih dalam di Uni Eropa, termasuk dalam hal kebijakan pertahanan dan keuangan. Macron berupaya memperkuat koordinasi antara negara-negara anggota dalam berbagai sektor, termasuk peningkatan anggaran pertahanan Uni Eropa dan kebijakan moneter yang lebih terkoordinasi. Namun, upaya ini juga menimbulkan ketegangan dengan beberapa negara anggota yang masih ingin mempertahankan tingkat kedaulatan nasional yang tinggi. Selain itu, Prancis dan Jerman kini lebih dominan dalam mengarahkan kebijakan perdagangan Uni Eropa. Sebelum Brexit, Inggris adalah salah satu negara yang paling mendukung kebijakan perdagangan bebas dan memiliki pengaruh besar dalam negosiasi perdagangan internasional. Dengan keluarnya Inggris, Prancis dan Jerman kini memiliki ruang lebih besar untuk mempengaruhi kebijakan perdagangan Uni Eropa, yang dapat menyebabkan pergeseran dalam pendekatan perdagangan Uni Eropa ke arah yang lebih proteksionis dibandingkan sebelumnya (Brexit Task Force, 2017).

Salah satu aspek penting yang disoroti dalam laporan Vote Watch Europe adalah dampak Brexit terhadap kebijakan regulasi Uni Eropa. Inggris selama ini dikenal sebagai negara yang menentang regulasi berlebihan dan cenderung mendorong kebijakan yang lebih ramah terhadap bisnis. Dengan keluarnya Inggris, kelompok yang mendukung regulasi yang lebih ketat terhadap perusahaan dan pasar keuangan menjadi lebih dominan di Uni Eropa. Brexit dapat menyebabkan peningkatan regulasi di sektor teknologi, karena Inggris sebelumnya merupakan salah satu negara yang menentang kebijakan Uni Eropa yang terlalu membebani perusahaan teknologi. Dengan tidak adanya Inggris, negara-negara seperti Prancis dan Jerman dapat lebih leluasa dalam

menerapkan kebijakan yang lebih ketat terhadap raksasa teknologi dan platform digital (Banks, 2016).

Selain itu, Brexit juga mengubah dinamika dalam kebijakan energi dan lingkungan Uni Eropa. Inggris sebelumnya merupakan salah satu pendukung utama eksploitasi energi non-konvensional seperti shale gas. Namun, dengan keluarnya Inggris, dukungan terhadap industri ini dalam Uni Eropa menurun, sementara kebijakan yang lebih berorientasi pada energi terbarukan semakin mendapatkan dukungan. Meskipun Uni Eropa tetap berusaha mempertahankan stabilitasnya, tantangan yang muncul pasca-Brexit menunjukkan bahwa integrasi regional tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Brexit menjadi contoh bagaimana dinamika politik domestik suatu negara dapat berdampak besar terhadap organisasi supranasional dan mempengaruhi arah kebijakan regional secara keseluruhan

Euro Skeptisisme dan Ancaman Disintegrasi

Brexit telah menjadi titik balik bagi Uni Eropa, mengguncang fondasi politik dan ekonomi yang telah lama dibangun oleh negara-negara anggota. Keputusan Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa tidak hanya berdampak pada stabilitas ekonomi kawasan, tetapi juga memicu meningkatnya euroskeptisisme di berbagai negara anggota lainnya, terutama di Italia, Hungaria, dan Polandia. European Parliament Directorate-General for Internal Policies, Policy Department for Economic and Scientific Policy menyoroti bahwa Brexit merupakan manifestasi dari ketidakpuasan terhadap tata kelola ekonomi dan politik Uni Eropa, yang pada gilirannya meningkatkan ketidakpastian dan potensi munculnya gerakan serupa di negara-negara lain.

Di banyak negara anggota, perdebatan tentang kedaulatan nasional versus kepentingan kolektif semakin menguat, dengan kelompok euroskeptis menekankan bahwa Uni Eropa gagal memberikan solusi bagi tantangan ekonomi domestik, seperti stagnasi ekonomi, tingginya pengangguran, serta meningkatnya krisis imigrasi. Meningkatnya pengaruh partai-partai populis yang menentang kebijakan supranasional Uni Eropa menandai pergeseran signifikan dalam politik kawasan. Fenomena ini meningkatkan potensi adanya negara lain yang mempertimbangkan untuk keluar dari Uni Eropa, sebuah skenario yang dapat semakin memperlemah kesatuan organisasi tersebut (Ferreira CAMPOS et al., 2016b).

Setelah Brexit, Italia muncul sebagai salah satu negara dengan sentimen euroskeptis yang meningkat. Partai-partai politik seperti Lega dan Fratelli d'Italia menguat dengan narasi bahwa Uni Eropa gagal memberikan manfaat nyata bagi ekonomi Italia. Krisis ekonomi yang berkepanjangan dan kebijakan fiskal yang ketat dari Brussel semakin menambah ketidakpuasan masyarakat. Seperti yang dicatat dalam European Parliament Directorate-General for Internal Policies, Policy Department for Economic and Scientific Policy, sentimen ini sebagian besar dipicu oleh kebijakan fiskal Uni Eropa yang membatasi fleksibilitas Italia dalam menangani krisis ekonomi. Di Hungaria, pemerintahan Viktor Orbán telah lama bersikap kritis terhadap Uni Eropa, khususnya terkait kebijakan imigrasi dan supremasi hukum. Pemerintah Hungaria menolak kebijakan kuota pengungsi yang diterapkan Uni Eropa dan sering berselisih dengan Brussel mengenai independensi hukum dan kebebasan pers. Euroskeptisisme di Hungaria semakin diperkuat oleh narasi bahwa Uni Eropa terlalu banyak mencampuri urusan domestik dan mengancam kedaulatan nasional (Ferreira CAMPOS et al., 2016c).

Polandia, yang dipimpin oleh Partai Hukum dan Keadilan (PiS), juga menunjukkan peningkatan euroskeptisisme. Pemerintah Polandia sering kali berseteru dengan Uni Eropa terkait reformasi peradilan yang dianggap mengancam demokrasi dan independensi hukum. Uni Eropa bahkan telah menerapkan mekanisme sanksi terhadap Polandia, yang semakin memicu ketegangan antara Brussel dan Warsawa. Seperti disebutkan dalam European Parliament Directorate-General for Internal Policies, Policy Department for Economic and Scientific Policy, ketidakpuasan terhadap kebijakan Uni Eropa di Polandia bukan hanya terkait isu hukum, tetapi juga mengenai distribusi dana Uni Eropa dan kebijakan energi yang dianggap lebih menguntungkan negara-negara besar seperti Jerman dan Prancis.(Campos & Macchiarelli, 2020b)

Keputusan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa telah menciptakan preseden bagi negara lain untuk mempertimbangkan langkah serupa. Beberapa politisi di Italia, Hungaria, dan Polandia telah menyuarakan kemungkinan referendum untuk meninjau kembali keanggotaan mereka di Uni Eropa. Walaupun hingga saat ini belum ada negara lain yang secara resmi memulai proses keluar, meningkatnya ketidakpuasan dapat menjadi faktor pemicu bagi disintegrasi lebih lanjut. European Parliament Directorate-General for Internal Policies, Policy Department for Economic and Scientific Policy menekankan bahwa ketidakpastian ekonomi yang disebabkan oleh Brexit telah menambah tekanan pada negara-negara yang ekonominya lemah, seperti Yunani dan Portugal. Negara-negara ini menghadapi dilema antara tetap berada dalam Uni Eropa dengan aturan fiskal yang ketat atau mencari alternatif lain yang lebih menguntungkan secara ekonomi.

Selain itu, munculnya blok-blok regional di dalam Uni Eropa juga dapat mempercepat fragmentasi. Negara-negara Eropa Timur yang tergabung dalam Grup Visegrad (Polandia, Hungaria, Republik Ceko, dan Slovakia) semakin sering menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan Uni Eropa, terutama dalam hal imigrasi dan subsidi keuangan. Jika tekanan politik domestik terus meningkat, negara-negara ini dapat mulai mempertimbangkan opsi serupa dengan Brexit. Menghadapi ancaman disintegrasi, Uni Eropa telah mengambil berbagai langkah untuk memperkuat kesatuan politik dan ekonomi kawasan. Salah satu pendekatan yang diambil adalah dengan meningkatkan fleksibilitas dalam kebijakan fiskal dan memberikan lebih banyak ruang bagi negara anggota untuk menyesuaikan kebijakan ekonomi domestik mereka. European Parliament Directorate-General for Internal Policies, Policy Department for Economic and Scientific Policy mencatat bahwa reformasi dalam tata kelola ekonomi Uni Eropa merupakan langkah penting untuk mengurangi ketidakpuasan negara anggota (Campos & Macchiarelli, 2020c).

Uni Eropa juga semakin memperkuat mekanisme sanksi terhadap negara-negara yang melanggar prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa aturan yang mengikat seluruh negara anggota tetap dihormati, serta untuk mencegah semakin meluasnya perpecahan politik di dalam organisasi. Brexit telah membuka babak baru dalam dinamika politik Uni Eropa, dengan meningkatnya euroskeptisisme di berbagai negara anggota dan meningkatnya potensi disintegrasi. Italia, Hungaria, dan Polandia menjadi contoh utama negara-negara di mana ketidakpuasan terhadap Uni Eropa semakin menguat, dipicu oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, dan politik. Meskipun hingga saat ini belum ada negara lain yang secara resmi mengumumkan niat untuk keluar dari Uni Eropa, tren politik menunjukkan bahwa gerakan euroskeptis terus berkembang. Uni Eropa menghadapi tantangan besar dalam

menjaga stabilitas dan mencegah lebih banyak negara meninggalkan organisasi (SD & Sherin, 2018).

Dampak terhadap Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Uni Eropa

Brexit telah memberikan dampak besar terhadap arah kebijakan luar negeri Uni Eropa (UE), baik dalam hubungan antar negara maupun dalam dinamika internal organisasi itu sendiri. Sebelum keluar dari UE, Inggris dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki pengaruh besar dalam perumusan kebijakan luar negeri Uni Eropa, terutama dalam menjalin hubungan strategis dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia. Sejak keluarnya Inggris dari Uni Eropa pada tahun 2020, terjadi perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri UE. Salah satu perubahan yang paling nyata adalah pembentukan Strategic Compass for Security and Defence yang resmi diadopsi pada Maret 2022.

Dokumen ini merupakan cetak biru baru UE untuk meningkatkan kemampuan militer kolektif dan respons krisis di luar negeri tanpa keterlibatan langsung Inggris. UE juga meningkatkan anggaran pertahanan dalam kerangka Fasilitas Perdamaian Eropa (EPF) hingga €5 miliar, yang digunakan untuk mendukung mitra strategis seperti Ukraina. Hal ini menunjukkan bahwa UE semakin menegaskan dirinya sebagai aktor keamanan independen pasca-Brexit (European External Action Service, 2022). Selain itu, hilangnya Inggris mendorong Uni Eropa untuk memperdalam kemitraan strategis dengan negara-negara seperti Jepang dan India, melalui perjanjian perdagangan dan kerja sama keamanan, yang sebelumnya dikembangkan Inggris secara lebih bilateral. Salah satu perubahan besar yang terjadi pasca Brexit adalah peralihan kepemimpinan kebijakan luar negeri Uni Eropa dari Inggris ke negara-negara besar lainnya, khususnya Perancis dan Jerman. Inggris telah lama dikenal memiliki pendekatan kebijakan luar negeri yang lebih pro-AS dibandingkan banyak negara anggota UE lainnya. Dengan hengkangnya Inggris, Perancis dan Jerman kini memiliki pengaruh yang lebih besar dalam membentuk hubungan UE dengan negara-negara mitra strategisnya (Leonard et al., 2019).

Selain itu, dalam hubungannya dengan Rusia, Uni Eropa kini menghadapi dilema baru. Inggris sebelumnya merupakan salah satu pendukung utama kebijakan sanksi terhadap Rusia, terutama setelah aneksasi Krimea pada tahun 2014. Setelah Brexit, beberapa negara anggota UE, seperti Italia dan Hongaria, menunjukkan keengganan untuk terus menerapkan kebijakan sanksi ketat terhadap Rusia, karena kepentingan ekonomi dan energi yang signifikan dengan negara tersebut. Pergeseran ini menunjukkan bahwa Uni Eropa harus menyesuaikan kembali pendekatan diplomasinya untuk mempertahankan posisinya di kancah politik global tanpa kehilangan daya tawar (Campos & Macchiarelli, 2020).

Dalam konteks hubungan dengan Tiongkok, Brexit juga menimbulkan ketidakpastian baru bagi kebijakan luar negeri Uni Eropa. Inggris sebelumnya berperan sebagai salah satu negara yang mendorong keterbukaan ekonomi dan perdagangan bebas dengan Tiongkok. Namun, setelah Brexit, Perancis dan Jerman mengambil pendekatan yang lebih hati-hati terhadap investasi Tiongkok dan ekspansi ekonomi di Eropa. Kebijakan ini mencerminkan kekhawatiran terhadap meningkatnya pengaruh ekonomi Beijing di sektor-sektor strategis Eropa, termasuk teknologi dan infrastruktur (Brexit Task Force, 2017).

Secara internal, Brexit juga mengubah dinamika politik dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri di Uni Eropa. Inggris sebelumnya sering bertindak sebagai penyeimbang antara kelompok negara yang mendukung integrasi lebih dalam dan negara yang lebih skeptis terhadap supranasionalisme UE. Dengan keluarnya Inggris, negara-negara seperti Belanda, Denmark, dan Swedia kehilangan sekutu utama mereka dalam memperjuangkan pendekatan yang lebih fleksibel terhadap kebijakan luar negeri dan keamanan UE (Leonard et al., 2019).

Brexit tidak hanya berdampak pada hubungan diplomatik Uni Eropa dengan mitra eksternal, namun juga mengubah arsitektur keamanan dan pertahanan kolektif di kawasan Eropa. Salah satu dampak terbesar Brexit adalah perubahan hubungan antara Uni Eropa dan NATO. Inggris tetap menjadi anggota NATO dan terus memainkan peran penting dalam aliansi tersebut. Namun, keluarnya Inggris dari Uni Eropa membuat koordinasi kebijakan antara UE dan NATO menjadi lebih kompleks (Banks, 2016). Sebelum Brexit, Inggris sering menjadi jembatan antara Uni Eropa dan NATO, mengingat ikatan sejarah yang kuat dengan Amerika Serikat dan keanggotaannya di kedua organisasi tersebut. Dengan tidak adanya Inggris di Uni Eropa, terdapat kekosongan dalam hubungan transatlantik yang sebelumnya difasilitasi oleh Inggris. Hal ini membuat Uni Eropa harus menyesuaikan pendekatannya dengan NATO, terutama dalam menghadapi ancaman bersama seperti Rusia dan terorisme global (Leonard et al., 2019).

Brexit juga berdampak pada kerja sama keamanan internal UE, khususnya di bidang intelijen, kontra-terorisme, dan pengendalian perbatasan. Inggris sebelumnya memainkan peran penting dalam sistem pertukaran data intelijen UE melalui Schengen Information System (SIS) dan Europol. Dengan keluarnya Inggris, UE harus menyesuaikan mekanisme pertukaran informasi ini agar dapat terus bekerja sama dengan Inggris tanpa mengorbankan efektivitas sistem keamanannya sendiri (Campos & Macchiarelli, 2020). Di sisi lain, Prancis mulai mengambil inisiatif lebih besar dalam mengembangkan kebijakan keamanan dan pertahanan Uni Eropa. Salah satu langkah utama yang diambil adalah memperkuat program Permanent Structured Cooperation (PESCO), yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama militer antar negara anggota UE dan mengurangi ketergantungan pada NATO. Namun inisiatif ini masih menghadapi tantangan dalam hal pendanaan dan konsensus politik di antara negara-negara anggota, terutama negara-negara Eropa Timur yang lebih memilih untuk tetap bergantung pada NATO dalam hal keamanan (Brexit Task Force, 2017).

Menanggapi tantangan yang ditimbulkan oleh Brexit, Uni Eropa telah mulai melakukan reformasi strategis dalam kebijakan pertahanannya. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memperkuat peran lembaga pertahanan UE seperti European External Action Service (EEAS) dan memperdalam kerja sama militer antar negara anggota melalui PESCO. Selain itu, Prancis semakin aktif mendorong pembentukan kekuatan pertahanan UE yang lebih otonom dari NATO. Inisiatif ini mendapat dukungan dari Jerman dan beberapa negara anggota lainnya yang ingin mengurangi ketergantungan terhadap Amerika Serikat dalam hal keamanan. Namun rencana tersebut masih menghadapi tantangan dari segi pendanaan dan kesepakatan politik antar negara anggota, terutama dari negara-negara Eropa Timur yang masih lebih mengandalkan NATO dalam kebijakan pertahanannya (Leonard et al., 2019).

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Uni Eropa juga mulai menjalin lebih banyak kerja sama bilateral dengan negara mitra seperti Kanada, Jepang, dan Australia.

Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat stabilitas keamanan global dan memastikan bahwa Uni Eropa terus mempunyai pengaruh terhadap isu-isu strategis bahkan tanpa keterlibatan langsung Inggris. Selain itu, Uni Eropa juga mulai menyusun strategi baru untuk menghadapi ancaman siber dan perang informasi. Dengan meningkatnya ancaman dari aktor negara seperti Rusia dan Tiongkok, Uni Eropa kini lebih fokus pada penguatan sistem keamanan digitalnya, termasuk kerja sama dalam regulasi teknologi dan perlindungan data. Langkah ini penting untuk memastikan Uni Eropa tetap mampu menghadapi ancaman keamanan modern yang semakin kompleks (SD & Sherin, 2018).

Stabilitas Institusi Uni Eropa Pasca-Brexit

Brexit tidak hanya mengubah peta politik dan ekonomi Eropa, tetapi juga berdampak langsung pada struktur kelembagaan Uni Eropa (UE). Sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar dan pengaruh politik yang signifikan, keluarnya Inggris dari UE telah menciptakan dinamika baru dalam distribusi kekuasaan di dalam organisasi tersebut. Salah satu perubahan paling nyata terjadi di Parlemen Eropa. Sebelum Brexit, Inggris mempunyai 73 kursi di Parlemen Eropa, yang kemudian dialokasikan kembali ke negara-negara anggota lainnya. Perubahan ini tidak hanya mengubah perimbangan kekuasaan di Parlemen Eropa, namun juga memperkuat posisi beberapa negara anggota dalam pengambilan keputusan.

Negara-negara seperti Perancis dan Jerman kini memiliki pengaruh yang lebih besar dalam menentukan arah kebijakan UE, sementara negara-negara kecil kehilangan sekutu penting dalam memperjuangkan kepentingan mereka (Luneto Riska, 2021). Selain perubahan representasi politik, Brexit juga berdampak pada pembagian kekuasaan di Dewan Uni Eropa. Sebelum Brexit, Inggris sering bertindak sebagai penyeimbang antara negara-negara yang mendukung integrasi lebih dalam dan negara-negara yang ingin mempertahankan kedaulatan nasionalnya. Pasca-Brexit, Perancis dan Jerman telah memperluas peran dominan mereka secara signifikan dalam struktur kekuasaan Uni Eropa. Misalnya saja dalam Franco-German Aachen Treaty (2019) dan didukung lebih lanjut dengan deklarasi bersama tahun 2021, kedua negara sepakat untuk memperkuat sinergi di bidang kebijakan luar negeri, pertahanan, dan kawasan industri strategis.

Dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan fiskal dan pemulihan pascapandemi (Next Generation EU), Jerman dan Perancis muncul sebagai pendorong utama terciptanya Dana Pemulihan sebesar €750 miliar, sebuah kebijakan yang awalnya ditolak oleh beberapa negara anggota seperti Belanda dan Swedia. Dampak dari ketidakseimbangan kekuatan ini menimbulkan kekhawatiran dari negara-negara kecil yang merasa bahwa integrasi semakin didorong oleh konsensus bilateral Jerman-Perancis, bukan oleh kolektivitas penuh antar anggota. Dalam beberapa sesi Parlemen Eropa, perwakilan negara Baltik dan Visegrad menyuarakan keprihatinan atas “pengambilalihan” kepemimpinan politik oleh kedua negara besar tersebut (Martill & Sus, 2023). Dengan tidak adanya Inggris, keseimbangan ini berubah, dimana Perancis dan Jerman mengambil peran yang lebih dominan dalam menentukan kebijakan UE (Leonard et al., 2019).

Secara ekonomi, kepergian Inggris menciptakan kesenjangan besar dalam anggaran Uni Eropa. Inggris adalah salah satu kontributor utama anggaran UE, sehingga kehilangan sumber pendanaan menyebabkan tekanan finansial bagi organisasi tersebut.

Untuk mengatasi masalah ini, Uni Eropa harus melakukan negosiasi ulang kebijakan anggarannya, dengan beberapa negara seperti Jerman dan Perancis diperkirakan akan meningkatkan kontribusinya untuk menutupi kekurangan yang ditinggalkan oleh Inggris (Campos & Macchiarelli, 2020). Namun kebijakan ini menimbulkan ketegangan di antara negara-negara anggota, terutama negara-negara kecil dan kurang berkembang yang bergantung pada subsidi dari Uni Eropa. Beberapa negara anggota merasa bahwa mereka tidak seharusnya menanggung dampak ekonomi dari Brexit, dan hal ini meningkatkan potensi konflik dalam diskusi kebijakan fiskal dan distribusi dana UE di masa depan (Banks, 2016).

Tanpa Inggris, proses pengambilan keputusan di Uni Eropa menjadi lebih terpusat pada negara-negara besar, khususnya Perancis dan Jerman. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan negara-negara anggota yang lebih kecil, yang merasa bahwa suara mereka semakin tidak didengar dalam proses legislatif. Sebelum Brexit, Inggris sering bertindak sebagai penghalang terhadap kebijakan yang dianggap terlalu mengikat atau terlalu berpusat pada otoritas supranasional. Inggris adalah salah satu negara yang paling sering memberikan suara menentang peraturan baru yang dirancang oleh Uni Eropa, terutama di bidang peraturan ekonomi dan bisnis. Dengan hengkangnya Inggris, Perancis dan Jerman memperoleh lebih banyak ruang untuk memperluas kebijakan integrasi, namun di sisi lain, negara-negara anggota lainnya kehilangan sekutu utama dalam menentang peraturan yang dianggap terlalu ketat (Leonard et al., 2019).

Selain itu, Brexit juga meningkatkan tantangan koordinasi kebijakan antara Uni Eropa dan negara-negara yang memiliki hubungan dekat dengan Inggris, seperti Norwegia dan Swiss. Inggris tidak lagi menjadi bagian dari UE namun masih memiliki hubungan dagang dan diplomatik yang erat dengan beberapa negara anggota. Hal ini menciptakan kompleksitas baru dalam negosiasi kebijakan luar negeri dan perdagangan di Uni Eropa (Campos & Macchiarelli, 2020). Dalam menghadapi tantangan ini, Uni Eropa harus mengembangkan mekanisme baru untuk memastikan bahwa setiap negara anggota tetap memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat mekanisme konsultasi antar negara anggota dan meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan. Inisiatif seperti Conference on the Future of Europe merupakan upaya untuk melibatkan masyarakat Eropa dalam proses legislasi, sehingga kebijakan yang diambil tidak hanya mencerminkan kepentingan negara-negara besar tetapi juga kebutuhan seluruh anggota UE (Ferreira CAMPOS et al., 2016).

Meningkatnya sikap skeptis terhadap euro setelah Brexit menimbulkan tantangan besar bagi Uni Eropa dalam menjaga stabilitas dan kohesi politiknya. Brexit menunjukkan adanya ketidakpuasan yang signifikan di kalangan warga Eropa terhadap kebijakan UE, terutama di bidang ekonomi, imigrasi, dan kedaulatan nasional. Sebagai tanggapannya, Uni Eropa mulai mengambil berbagai langkah untuk memperkuat legitimasi dan transparansi kelembagaannya. Salah satu langkah utama yang diambil adalah meningkatkan komunikasi antara lembaga-lembaga UE dan masyarakat umum. Kampanye informasi mengenai manfaat integrasi Eropa semakin diperkuat untuk mengurangi kesalahpahaman dan sentimen negatif terhadap Uni Eropa (SD & Sherin, 2018).

Selain itu, Uni Eropa juga berupaya memperbaiki sistem pengambilan keputusan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan. Konferensi seperti Conference on the Future of Europe dirancang untuk memberikan ruang bagi

warga negara UE dalam menentukan arah kebijakan masa depan organisasi tersebut. Dengan cara ini, UE berharap dapat membangun kembali kepercayaan publik dan mengurangi ancaman gerakan euroskeptis yang dapat mengarah pada potensi disintegrasi lebih lanjut (Ferreira CAMPOS dkk., 2016). Selain itu, Uni Eropa juga meningkatkan keterlibatan dengan pemerintah nasional untuk memastikan kebijakan UE tetap selaras dengan kepentingan domestik masing-masing negara anggota.

Dengan memperkuat hubungan antara lembaga-lembaga UE dan pemerintah nasional, Uni Eropa dapat mengurangi persepsi bahwa kebijakan-kebijakannya terlalu jauh dari kebutuhan nyata warga negaranya (Leonard et al., 2019). Setelah Brexit, sikap skeptis terhadap euro mengalami peningkatan yang signifikan di beberapa negara anggota. Di Italia, survei Eurobarometer menunjukkan bahwa pada tahun 2020 hanya 34% responden yang percaya bahwa UE mewakili kepentingan nasional mereka, angka ini mengalami penurunan dibandingkan sebelum tahun 2016 (Eurobarometer, 2020). Partai Lega dan Fratelli d'Italia semakin vokal dalam menyerukan reformasi struktural UE atau bahkan membuka wacana Italexit, meskipun mereka belum berkampanye secara formal dalam referendum.

Di Hongaria, pemerintahan Viktor Orbán menggunakan Brexit sebagai pembenaran atas kebijakan anti-Brussel, khususnya mengenai migrasi dan supremasi hukum. Pemerintah Hongaria terus menolak intervensi hukum UE dan menyatakan bahwa Brexit memberikan preseden bahwa negara-negara anggota dapat “melawan” pusat kekuasaan supranasional jika mereka dianggap tidak adil. Sementara itu, Polandia juga menunjukkan ketegangan yang serius dengan UE, terutama setelah Mahkamah Konstitusi Polandia memutuskan bahwa hukum nasional lebih unggul dari hukum UE pada tahun 2021, sebuah keputusan yang bertentangan dengan prinsip dasar integrasi. Di berbagai forum politik, anggota Partai PiS menyebut Brexit sebagai contoh keberanian politik untuk menolak dominasi Brussels terhadap sistem hukum domestik (Oliver, 2016; Rees, 2017).

KESIMPULAN

Brexit merupakan titik balik yang mengguncang struktur politik, keamanan, dan kelembagaan Uni Eropa. Keputusan Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa tidak hanya mencerminkan ketidakpuasan domestik terhadap kebijakan supranasional, namun juga memiliki dampak luas terhadap arah masa depan integrasi regional Eropa. Sebagai negara dengan kekuatan ekonomi dan politik yang besar, keluarnya Inggris meninggalkan kekosongan strategis yang memaksa Uni Eropa menyesuaikan berbagai kebijakan internal dan eksternalnya.

Dalam konteks kebijakan luar negeri dan keamanan, Uni Eropa mulai mengambil langkah konkrit untuk memperkuat otonominya, seperti melalui penerapan *Strategic Compass* dan peningkatan anggaran pertahanan melalui *European Peace Facility*. Selain itu, absennya Inggris telah mengubah dinamika hubungan diplomatik, mendorong negara-negara besar seperti Jerman dan Prancis tampil lebih dominan dalam mengarahkan kebijakan regional dan menjalin kemitraan strategis baru. Meningkatnya dominasi Jerman dan Prancis juga menunjukkan ketimpangan kekuasaan di Uni Eropa. Negara-negara kecil dan kawasan Eropa Timur mulai menyuarakan kekhawatiran terhadap konsentrasi kekuasaan yang berlebihan, yang berpotensi mengikis prinsip kolektivitas dalam proses pengambilan keputusan. Situasi ini menambah tantangan bagi

Uni Eropa dalam menjaga legitimasi dan kesetaraan partisipasi di antara seluruh anggotanya.

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memperluas pemahaman akademik tentang dinamika integrasi regional di tengah krisis politik seperti Brexit. Dengan menggunakan perspektif teori integrasi regional, studi ini menawarkan kerangka analitis yang dapat digunakan untuk mengevaluasi tantangan dan respons kebijakan Uni Eropa dalam konteks ketidakpastian politik. Temuan-temuan dalam penelitian ini juga relevan bagi para pembuat kebijakan, karena menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan kekuasaan, meningkatkan legitimasi kelembagaan, serta memperkuat partisipasi politik negara anggota agar proyek integrasi regional dapat berlanjut secara inklusif dan berkelanjutan.

Brexit juga memperkuat gelombang *euroskeptisisme* di negara-negara anggota lainnya. Italia, Hungaria dan Polandia merupakan contoh nyata dimana permasalahan kedaulatan, krisis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga UE dan ketidakpuasan ekonomi telah menyebabkan munculnya gerakan-gerakan yang menyerukan pembaruan keanggotaan. Sentimen-sentimen tersebut menunjukkan bahwa Uni Eropa tidak hanya menghadapi tantangan struktural, namun juga krisis kepercayaan yang harus dijawab melalui reformasi komprehensif. Menghadapi kompleksitas tantangan *pasca-Brexit*, Uni Eropa harus melakukan dua hal secara bersamaan: memperkuat kapasitas integrasi dan menjaga inklusivitas politik di antara para anggotanya. Reformasi kebijakan, penguatan kelembagaan, dan partisipasi masyarakat yang lebih luas merupakan kunci untuk memastikan proyek integrasi regional dapat bertahan dalam menghadapi tekanan disintegrasi. Dengan langkah-langkah adaptif dan strategis, Uni Eropa masih mempunyai peluang besar untuk mempertahankan relevansinya sebagai aktor regional yang stabil, solid, dan kompetitif di tengah dinamika global yang terus berubah.

REFERENSI

- Banks, M. (2016, April 20). Brexit would “substantially” change dynamics of EU institutions. <https://www.theparliamentmagazine.eu/news/article/brexit-would-substantially-change-dynamics-of-eu-institutions>
- Brexit Task Force, I. (2017). Occasional Paper Series A review of economic analyses on the potential impact of Brexit A Review Of Economic Analyses On The Potential Impact Of Brexita review of economic analyses on the potential impact of Brexit-Contents. <https://doi.org/10.2866/977526>
- Campos, N., & Macchiarelli, C. (2020a). LSE “Europe in Question” Discussion Paper Series Brexit and the Euro.
- Campos, N. F., & Macchiarelli, C. (2020). The United Kingdom and the Stability of the Euro Area: From Maastricht to Brexit. *The World Economy*, 43(7), 1792–1808. <https://doi.org/10.1111/twec.12919>
- Eurobarometer. (2020). Standard Eurobarometer 93: Public opinion in the European Union. European Commission. <https://europa.eu/eurobarometer>
- European External Action Service. (2022). Strategic Compass for Security and Defence: For a European Union that Protects Its Citizens, Values and Interests and Contributes to International Peace and Security. EEAS. https://www.eeas.europa.eu/eeas/strategic-compass-security-and-defence_en
- Farhan Anshari, M. (n.d.). Potensi Dampak Brexit Terhadap Perekonomian Inggris.

- Ferreira CAMPOS, N., Macchiarelli, C., Hartwell, C., Horvath, R., Hachula, M., Piffer, M., Rieth, M., Lastra, R., & Whelan, K. (2016a). Directorate General For Internal Policies Policy Department A: Economic And Scientific Policy An assessment of the impact of Brexit on euro area stability.
- Leonard, B., Katja, S., & Bastian, M. (2019). The impact of the UK's withdrawal on the institutional set-up and political dynamics within the EU Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs.
- Leonard, M., Pisani-Ferry, J., Ribakova, E., Shapiro, J., & Wolff, G. B. (2019). How Britain Can Shape Europe's Foreign Policy After Brexit. Carnegie Endowment for International Peace.
- Luneto Riska. (2021). Dinamika Uni Eropa: Integrasi Kawasan dan Referendum Britania Raya.
- Martill, B., & Sus, M. (2023). Withdrawal Symptoms: Party Factions, Political Change and British Foreign Policy Post-Brexit. *Journal of European Public Policy*, 30(5), 731–748. <https://doi.org/10.1080/13501763.2023.2198578>
- Neo-Fungsionalisme Dalam Uni Eropa. (n.d.).
- Oliver, T. (2016). European and International Views of Brexit. *Journal of European Public Policy*, 23(9), 1321–1328. <https://doi.org/10.1080/13501763.2016.1174534>
- Rees, W. (2017). The European Geopolitical Space and the Long Path to Brexit: The Government and Opposition/Leonard Schapiro Lecture 2020. *Government and Opposition*, 55(1), 1–19. <https://doi.org/10.1017/gov.2020.4>
- SD, H. A., & Sherin, V. (2018). Pengaruh British Exit (Brexit) Terhadap Kebijakan Pemerintah Inggris Terkait Masalah Imigran. *Intermestic: Journal of International Studies*, 2(2), 156. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v2n2.4>